

# KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 MENGENAI PEMBATALAN

## PASAL 268 AYAT (3) KUHAP

**Dian Puspita,<sup>1</sup> Koesno,<sup>2</sup> Lucky<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505  
Email : [dianpoess@gmail.com](mailto:dianpoess@gmail.com)

### **Abstract**

*This journal is intended to explain and analyze the fundamentals or principles that underlie the urgency of the request reconsideration of a decision made only once, as well as to describe and analyze the legal implications of the Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 regarding the cancellation of article 268 paragraph (3). This journal is made with normative method, the approach to legislation, case-based approach, and the approach to the concept of comparative approaches. The results of this paper show the urgency request reconsideration of a decision can only be done one time is for the sake of legal certainty as the purpose of the law itself, with the hope when kepatian law has been reached then the certainty that there will be justice. Juridical implications of the Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-XI / 2013 regarding the cancellation of Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code is give rise to legal uncertainty because of the decision to cancel the article only in the absence of the proposed new arrangements so that the cancellation of the proposal review time can be interpreted only one reconsideration may be filed more than once, many times, or even without any restriction submission. This ruling on the one hand shows that substantive justice should not be hindered by procedural justice.*

**Key words:** *constitutional court decision, revocation, reconsideration, legal implications*

### **Abstrak**

Jurnal ini ditujukan untuk menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar atau asas-asas yang melandasi urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dilakukan satu kali saja, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3). Jurnal ini dibuat dengan metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep dan pendekatan komparatif. Hasil jurnal ini menunjukkan urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali adalah demi tegaknya kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

<sup>2</sup> Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

dengan harapan ketika kepatian hukum sudah tercapai maka dalam kepastian itu akan ada keadilan. Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan tersebut hanya membatalkan pasal yang diajukan tersebut tanpa adanya pengaturan yang baru sehingga dengan dibatalkannya pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali bisa ditafsirkan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, berkali kali atau bahkan tanpa ada batasan pengajuan. Putusan ini disatu sisi menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak boleh dihalangi oleh keadilan prosedural.

**Kata kunci:** putusan mahkamah konstitusi, pembatalan, peninjauan kembali, implikasi hukum

### **Latar Belakang**

Suatu lembaga peradilan disebut baik, bukan saja jika prosesnya berlangsung jujur, bersih, dan tidak memihak, namun juga bersifat terbuka, korektif dan rekorektif. Di dalam kriteria tersebut terdapat bagian dari prinsip *fairness* (penilaian menyangkut kebenaran dalam perkara tersebut) dan *trial independency* (peradilan bebas dan tidak berpihak / *fair trial*) yang menjadi prinsip-prinsip universal.<sup>4</sup>

Prinsip universal mengakui bahwa semua orang sama dan mempunyai hak sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atas sikap diskriminasi apapun. Setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional jika ada pelanggaran hak-hak yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Para pihak yang mengalami proses peradilan, termasuk dalam upaya Peninjauan Kembali (selanjutnya akan disebut PK), diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap putusan yang dipandang tidak adil.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dibentuknya lembaga PK dalam perkara pidana berpijak pada pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan<sup>5</sup> :

---

<sup>4</sup> Pasal 10 **The Universal Declaration of Human Right**, United nations General Assembly, December, 10<sup>th</sup>, 1948.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, **Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakkan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat)**, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 7-8.

"Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Untuk selanjutnya, aturan mengenai syarat dapat dilakukannya permintaan upaya peninjauan kembali tercantum dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan :

- a. "apabila terdapat keadaan baru atau bukti baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru atau bukti baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusna yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

Selanjutnya dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan "membatasi permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali".

Kemudian dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang".

Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu", antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya, sedangkan di dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali".<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, Bandung, Citra Umbara, 2014, hlm. 213 dan 233

Ada beberapa aturan undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali atau putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali yaitu terdapat pada pasal 268 ayat (3) KUHAP, pasal 24 ayat (2) Undang-Undang no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) No 10 Tahun 2009 mengenai permohonan peninjauan kembali.

Permohonan PK tersebut dalam perundang-undangan diatas, harus diakui benar bahwa bertentangan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty principle/ rechtmatigheid* menurut Gustav Radburch meninjau sisi yuridis) yang menentukan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diubah lagi. Namun, dengan berorientasi pada tuntutan asas keadilan (*fairness/ gerechtigheid* meninjau sisi filosofis), putusan hakim itu tetap dapat diajukan upaya hukum PK dengan persyaratan yang ketat dan limitatif, baik perihal subyek, alasan, prosedur, serta hasil pengajuannya.

Namun dalam perkembangannya, syarat limitasi yang membatasi pengajuan PK dalam pasal tersebut di atas telah diajukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Antasari Azhar, Ida Laksmiwyaty, serta Ajeng Oktarifka Antasari Putri, dimana Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon:
  - 1) Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1) Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Terkait dengan adanya amar putusan MK tersebut akan membuka kemungkinan dilakukannya PK lebih dari 1 kali yang nantinya dikhawatirkan juga bisa menambah arus perkara di MA. Terpidana yang pernah ditolak PK-nya tentu dapat lagi mengajukan kembali, baik dengan alasan yang sama maupun berbeda, kondisi ini sangat bertentangan dengan pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Apa urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dilakukan satu kali saja?
2. Apa implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHP?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait dasar-dasar atau asas-asas yang melandasi urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dilakukan satu kali maupun lebih dari sekali saja serta implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHP.

Penelitian yang sudah dilakukan kemudian dianalisis menggunakan teori sistem peradilan pidana, teori tujuan hukum, dan teori hukum progresif. Teori sistem peradilan pidana dan teori tujuan hukum dapat menganalisis argumentasi hukum yang dipergunakan dalam menunjukkan keurgensian PK hanya satu kali serta PK lebih dari satu kali pasca putusan MK. Teori tujuan hukum dan teori hukum progresif dapat mengkaji dan menganalisis tentang implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHP.

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya konsep yang menyokong perkembangan Ilmu Hukum dan Hukum Acara Pidana pada khususnya yang secara substansial lebih terfokus upaya permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Sedangkan secara praktis, diharapkan dapat memberi sumbangan dan masukan yang berarti dalam melaksanakan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 serta memberikan konsep pemikiran tentang

kebijakan hukum yang akan memberikan tambahan pengetahuan dan informasi dalam proses pembaharuan hukum pidana dalam upaya pengajuan permohonan peninjauan kembali.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berupa studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Pembahasan dalam penelitian ini dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang No. 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang - Undang No. 5 tahun 2004 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang - Undang No. 24 tahun 2003 yang diubah dengan Undang - Undang No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Kaidah hukum yang terjadi dalam praktik dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan Hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHP. Adapun teori hukum yang digunakan yaitu teori sistem peradilan pidana, teori tujuan hukum, dan teori hukum progresif.

Teknik yang digunakan dalam pengolahan bahan maupun analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif yaitu suatu metode analisis bahan untuk mengetahui makna yang sebenarnya dengan terlebih dahulu direduksi untuk memilih sebagai bahan hukum dan kesesuaiannya terhadap proses penelitian ini. Setelah analisis, diperjelas, kemudian diberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibenturkan dengan teori yang berguna sebagai pisau analisis dalam penelitian.

## **Pembahasan**

### **a. Urgensi Permintaan Peninjauan Kembali Atas Suatu Putusan Hanya Dilakukan Satu Kali**

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal justice sytem*) merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Dari pemahaman tersebut, terlihat adanya beberapa penekanan, yaitu : Pertama, adanya sistem dari suatu proses yang merupakan proses pelaksanaan tanggung jawab yang terdapat dalam suatu lembaga peradilan pidana. Kedua, adanya fungsi komponen-komponen yang berperan menjalankan proses tersebut, dimana sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.<sup>7</sup> Ketiga, adanya penekanan bagaimana tiap-tiap komponen menjalankan tugasnya. Keempat, adanya tujuan dari proses bekerjanya komponen-komponen dalam sistem tersebut.

Dari jaringan (*network*) tersebut yang telah difasilitasi dengan sedemikian rupa yaitu dalam rangka mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya yang mencerminkan keadilan termasuk dengan adanya upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni berupa upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang disebut dengan Peninjauan Kembali (PK).

Ketentuan ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.<sup>8</sup> Nilai tersebut juga selaras dengan tujuan dari pembentukan KUHAP, yaitu bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, atau setidaknya mendekati kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat, yang bertujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat dituduh,<sup>9</sup> dalam rangka menegakkan ketertiban umum, serta untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu.

Asas persamaan kedudukan di muka huku (*equality before the law*) telah

---

<sup>7</sup> Mardjono Reksodipoetro, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)**, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>8</sup> **Risalah Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1979**

<sup>9</sup> Ibid.

ditentukan sejak proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan sidang pengadilan, dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum untuk melindungi baik bagi kepentingan negara maupun kepentingan terdakwa, serta lebih jauh tentunya juga bagi kepentingan korban. KUHAP sebagai hukum formil lah yang merumuskan sejumlah hak bagi terdakwa sebagai pelindung terhadap adanya kemungkinan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hak tersebut seperti yang dicantumkan dalam pasal 50 sampai 68 KUHAP.

Norma dasar seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 juga dapat terlihat dalam isi KUHAP itu telah memberi petunjuk secara jelas bahwa negara Indonesia melalui lembaga-lembaganya menerima kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan, diharuskan melaksanakan kekuasaannya dengan tujuan yaitu untuk pemenuhan hak masyarakat, guna memperoleh suatu keadilan melalui proses penegakkan hukum.

Dalam negara hukum yang demokratis, secara teoritik dan konseptual di dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) terdapat hal yang dapat kita sebut "*area of no enforcement*", dimana kekuasaan negara dibatasi secara tegas dan pasti agar tidak melanggar berlakunya asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) dalam hukum pidana. Semua tindakan negara harus berdasarkan tatanan hukum yang telah ditetapkan lebih dulu. Tindakan menegakkan kepentingan hukum dalam rangka menjaga ketertiban umum melalui proses penegakkan hukum pidana, negara berbuat dan bertindak. Dalam proses itu tindakan negara dapat menyalahi tatanan hukum, menimbulkan terampasnya hak-hak dan keadilan, kondisi akibat itu tidak dapat lagi dipulihkan dengan upaya hukum biasa melainkan dengan upaya hukum luar biasa, disinilah letak arti pentingnya upaya Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa. Luar biasa yang dimaksud dalam hal ini karena upaya hukum tersebut diajukan untuk melawan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adapun dasar dibentuknya lembaga PK dalam perkara pidana berpijak pada ketentuan yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan



bahwa :

*"Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya yang mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".*

Serta di dalam ketentuan Pasal 268 (3) ditentukan bahwa Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut dan hanya dapat dilakukan satu kali.

Landasan filosofis yang terkandung dalam upaya hukum luar biasa PK ini ialah untuk memberikan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, dengan jalan membuka kembali perkara yang telah diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali perkara pidana merupakan upaya pengembalian keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah, bentuk pertanggungjawaban negara pada terpidana, dan sebagai wujud penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan negara yang telah merampas keadilan dan hak-haknya secara tidak sah atau negara telah melaukan kesalahan besar atau dosa terhadap warga negaranya yang semestinya harus dilindunginya.

Alasan-alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, diatur dalam pasal 66 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dua kali diubah. Syarat materiil pengajuan PK - Pasal 263 (2) KUHAP :

1. Keadaan baru, adalah suatu keadaan yang sudah ada sebelum/pada saat sidang pemeriksaan perkara berlangsung, yang baru diketahui setelah putusan menjadi tetap. Keadaan tersebut baru diketahui keberadaannya dari alat-alat bukti yang baru diketahui/ditemukan kemudian setelah perkara diputus dan menjadi tetap. Alat bukti inipun sesungguhnya juga bukan alat bukti baru, melainkan alat bukti yang sudah ada pada saat sidang berlangsung, bahkan sebelumnya, namun belum diajukan dan diperiksa di sidang.<sup>10</sup>
2. Pelbagai putusan yang saling bertentangan, adalah terdapatnya dua atau lebih putusan yang saling berhubungan dan bersifat saling pengaruhi terhadap satu dengan yang lain secara timbal balik, dimana pertimbangan hukumnya atau amar putusannya saling bertentangan.

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, **Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana**, Malang, Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 265

3. Putusan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, merupakan kesalahan hakim dalam memutus.

Berkaitan dengan Keadaan baru (*novum*) yang dapat dijadikan landasan permintaan peninjauan kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat, yaitu :<sup>11</sup>

1. Jika keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Parameter yang dapat dijadikan dasar bahwa pengaruh keadaan baru tersebut sangat kuat adalah:<sup>12</sup>

- 1) Didukung oleh sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP.
- 2) Berdasarkan hukum pembuktian, "keadaan baru" tersebut mempunyai hubungan dan pengaruh langsung, karenanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan pidana semula yang dilawan dengan upaya hukum peninjauan kembali.
- 3) Berupa syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih ringan.

Menurut hemat penulis, terkait dengan pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung telah dijalankan beriringan dengan peraturan yang diatur di dalam KUHAP, karena mengatur hal yang sama-sama bersifat umum. Pembatasan yang diatur didalam KUHAP maupun undang-undang MA tersebut tidak akan menyimpangi satu sama lain karena sama-sama bertujuan memberikan kepastian hukum dan prinsip cepat murah sederhana sesuai asas dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pembatasan pengajuan PK yaitu terbatas hanya untuk satu kali didasarkan pada tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 598.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, Op.cit., h. 65.

hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Rabruch adapun tujuan hukum adalah Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Prinsip PK diajukan hanya satu kali merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya hukum. Dalam hal ini kepastian hukum mendapat ruang yang lebih besar dari pada keadilan. Akan tetapi mencapai kepastian hukum disini bukan tanpa adanya ruang untuk mencari keadilan melainkan proses mencapai keadilan dibatasi yaitu hanya melalui PK satu kali saja.

Jika dilihat dari segi praktek dan proses persidangan, ruang dan kesempatan dalam mencapai suatu keadilan tersebut sesungguhnya sudah terbuka lebar mulai dari tahapan pemeriksaan perkara ditingkat pengadilan negeri dimana dalam 7 hari pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi setelah itu juga diberi kesempatan selama 14 hari untuk mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Selain hal tersebut juga diberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali satu kali sebagai upaya hukum luar biasa setelah upaya hukum biasa dilalui semuanya.

Dalam proses yang demikian tentunya sudah memberikan ruang yang sangat luas bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan yang semestinya adalah haknya, dan proses untuk hal tersebut sesungguhnya adalah proses yang amat sangat panjang bahkan dalam prakteknya suatu perkara pidana tersebut baru berakhir atau mempunyai kekuatan tetap setelah proses bertahun tahun telah berlalu. Sehingga mengingat keadaan yang demikian maka kepastian hukum menjadi perlu di jamin dengan adanya batasan pengajuan PK yaitu cukup satu kali.

Akan tetapi berlakunya ketentuan tersebut sesungguhnya sudah menutup kemungkinan untuk mengejar keadilan sampai pada keadilan yang sesungguhnya (keadilan materil) sekalipun dikemudian hari setelah kesempatan PK satu kali baru diketahui kebenaran materil tersebut.

Dalam hal yang demikian terlihat bahwa sengguhnya makna tujuan hukum yang terkandung dalam batasan pengajuan PK tersebut adalah lebih mengedepankan kepastian daripada keadilan. berkaitan dengan kepastian hukum

tersebut juga ada asas yang menyebut setiap perkara harus ada akhirnya yang disebut dengan istilah *Litis Finiri Oportet*. Prinsip yang demikian mengarah kepada *offender oriented* yaitu keadilan *retributive*. Dengan asumsi dalam suatu kepastian hukum tersebut akan ada suatu keadilan.

Selain alasan yang demikian pelaksanaan PK hanya satu kali juga sesuai sesuai dengan pasal 268 ayat (3) KUHAP, dilaksanakan berdasarkan atas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini merupakan dasar di dalam penanganan perkara pidana sejak diajukan ke pihak peradilan. Oleh sebab itu hukum acara pidana menjelaskan dalam proses di dalam peradilan yang bersifat cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas dalam sistim peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketentuan tersebut dicantumkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan agar para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan ada kepastian tentang bagaimana tata cara mempertahankan hak, kapan dapat memperoleh hak tersebut serta berapa biaya yang harus dikeluarkan guna memperoleh hak tersebut.

#### **b. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Mengenai Pembatalan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP.**

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang secara langsung berperkara, tetapi juga secara keseluruhan terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Hal ini dikarenakan sifat norma undang-undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah norma yang bersifat umum (*abstract and impersonal*). Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi sudah semestinya dapat berlaku mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia sejak putusan itu dikeluarkan.<sup>13</sup>

Putusan MK sebagai *negative legislator*, pasti memiliki implikasi karena mempengaruhi apa yang menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum. Dalam konteks Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 terkait pembatalan pembatasan permohonan pengajuan PK dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menjadi inti

---

<sup>13</sup> Pusat Kajian Konstitusi FH-UB, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 1, Februari 2011, **Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kabupaten Malang dan Kota Pasuruan)**, hlm. 155

putusan adalah bahwa pasal yang mengatur tentang permohonan pengajuan PK yang dimohonkan pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan dihapuskannya pasal 268 (3) KUHAP yang membatasi pengajuan peninjauan kembali terbatas satu kali saja maka dapat ditafsirkan bahwa peninjauan kembali bisa diajukan lebih dari satu kali, berkali kali atau bahkan tidak ada batasan pengajuan.

Disisi lain pada saat proses pembuatan putusan sampai dengan dibacakan putusan, tentunya banyak argumen yang muncul dari berbagai kalangan yang menanyakan tentang kejelasan amar putusan tersebut, diantaranya terkait dengan bagaimana kepastian hukum terkait dengan pembatasan permohonan pengajuan PK apabila tidak ada aturan yang setara dengan perundang-undangan yang mengaturnya, serta bagaimana dengan proses pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebab diputuskannya putusan MK itu menimbulkan kekaburan norma, yaitu muncul asumsi bahwa PK dapat dilakukan berulang kali tanpa ada batasan / limitasi.

Putusan No. MK 34/ PUU-XI/ 2013 menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Menurut Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, putusan MK tersebut menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain berdampak serius bagi proses peradilan di Indonesia karena berpengaruh bagi kepastian hukum di negeri ini. Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Nyoman Serikat Putra Jaya, juga menilai putusan MK tersebut memunculkan ketidakpastian hukum karena pemberian kesempatan PK berkali-kali dan tidak terbatas dapat digunakan oleh pihak yang berperkara sebagai permainan. Guru besar ini juga tidak menyangkal pertimbangan hukum MK mengenai pemberian rasa keadilan bagi seorang terpidana, namun perlu juga mempertimbangkan kepastian hukum. Oleh karena itu setiap pihak yang berperkara baik jaksa maupun terpidana hanya mempunyai satu kali kesempatan mengajukan PK.

Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Ketua MK, Mahfud MD, yang menilai putusan MK terkait peninjauan kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali dapat mengacaukan dunia hukum. Ini disebabkan kepastian hukum akan

hilang, karena orang yang belum dihukum masih bisa dianggap belum bersalah. Kepastian hukum yang dibangun dalam paradigma hukum progresif memang harus diletakkan di bawah keadilan, namun kepastian hukum tidak selalu tidak adil sebab keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Marzuki Ali, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bahwa pengajuan PK lebih dari satu kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan membuat eksekusi atas pidana yang telah dijatuhkan tidak kunjung terwujud, meskipun Putusan MK tersebut melegakan bagi pencari keadilan.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mudzakir, pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, yang menilai putusan MK tersebut akan menciptakan keadilan berdasarkan kepastian hukum, karena PK yang bisa diajukan lebih dari satu kali akan bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya memunculkan rasa ketidakadilan. Putusan MK tersebut mendapat tanggapan dari Mahkamah Agung (MA). Ketua MA, Hatta Ali, menyatakan MA tetap akan membatasi upaya hukum PK sebanyak dua kali. Hal ini untuk menghindari lahirnya ketidakpastian hukum akibat PK yang diajukan berkali-kali sebagai implikasi dari pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHP. Pembatasan ini dapat dilakukan melalui peraturan yang ditetapkan oleh MA atau Revisi UU MA.

Putusan MK ini baru dapat dikatakan memiliki implikasi semenjak diputuskan. Penerapan suatu putusan MK sangatlah bergantung kepada sejauh mana institusi-institusi formal yang ada, memiliki kemauan untuk menjadikan putusan MK sebagai dasar otoritasnya, dalam hal ini MK sendiri sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa putusan MK sebagaimana disebutkan di atas mengandung dualisme sehingga menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda. Putusan MK tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum suatu perkara meskipun memberikan keadilan bagi orang yang berperkara, sehingga diperlukan pengaturan baru mengenai PK dalam suatu peraturan perundang-undangan.

PK pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, dan bisa

diajukan oleh pihak yang berperkara. PK merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Ada tiga alasan permintaan PK berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu fakta adanya *novum*, fakta terdapat putusan yang saling bertentangan, atau fakta adanya kekhilafan/ kekeliruan nyata dari majelis hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan telah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 (UU MA), dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Ini berarti jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan terjadi pengabaian terhadap undang-undang atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daag*). Selain prinsip tersebut, harus juga diperhatikan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) sebagaimana tersurat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD N RI Tahun 1945. Secara faktual sebelum ada putusan MK, MA melalui Surat Edaran MA (SE-MA) No 10 Tahun 2009 telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk melakukan PK lebih dari satu kali untuk perkara yang mempunyai pertentangan putusan persidangan.

Putusan MK No. 34/ PUU-XI/2013 yang mengeliminasi ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bersifat *conditionally constitutional*. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa PK dapat diajukan beberapa kali secara serta merta untuk ketiga alasan pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. PK dapat diajukan lebih dari satu kali hanya diperbolehkan apabila ditemukan *novum* baru berdasarkan pemanfaatan iptek dan teknologi. Dengan demikian, pengajuan PK ini tidak akan mengganggu keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena kepastian hukum pada prinsipnya sudah mulai tercipta sejak ada putusan *inkracht van gewisjde*.

Hukum tidak pernah bermain di wilayah kosong (*nullum delictum noela poena sine praevia logi poenale*), sehingga peluang pengajuan PK lebih dari satu kali perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam undang-undang terkait. Ketentuan mengenai PK ini perlu dimasukkan dalam agenda revisi KUHAP yang sedang dibahas oleh DPR RI antara lain mengenai persyaratan dan pembatasan

pengajuan PK. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Jika tidak diatur dalam RUU KUHAP atau undang-undang terkait maka untuk menghindari kekosongan hukum MA dapat menggunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU MA yang memberikan kewenangan kepada MA untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Terkait dengan urgensi permintaan PK hanya sekali yaitu terkait dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dan pelaksanaan sistem kamar di MA terkait dengan proses pemeriksaan dan putusan PK oleh hakim agung adalah Pemeriksaan PK di MA harus dilakukan oleh Hakim Agung yang bukan merupakan majelis Kasasi (ada ketentuan bahwa hakim yang memeriksa PK bukanlah hakim yang memeriksa perkara tersebut sebelumnya), atas dasar ketentuan itulah, salah satu ahli hukum dalam hal ini Ketua Badan Pengawasan apabila sesuai dengan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 maka PK kini dapat dilakukan secara berulang kali, dengan simulasi sebagai berikut <sup>14</sup>:

- a) Hakim Agung yang menerima perkara pidana kasasi akan memeriksa perkara dalam satu majelis yang berjumlah 3 orang dalam, dalam hal ini kita misalkan Hakim Agung pemeriksa kasasi tersebut adalah ABC, memutus dengan amar putusan ditolak.
- b) Maka untuk memenuhi hak nya demi menegakkan keadilan pihak yang kalah akan mengajukan upaya hukum luar biasa, Dalam hal ini PK akan diajukan melalui Pengadilan Negeri seperti simulasi pada Bagan 6 sebelumnya.
- c) Kemudian setelah Perkara masuk ke MA, Ketua Mahkamah Agung akan mendelegasikan perkara tersebut ke dalam kamar Pidana yang nantinya yang akan di periksa oleh majelis hakim agung DEF (dimana Hakim Agung yang memeriksa bukanlah hakim Agung yang telah memeriksa perkara sebelumnya).
- d) Perkara PK perkara pidana yang masuk akan diperiksa oleh Hakim Agung yang ada dalam kamar pidana.
- e) Dalam hal pemeriksaan perkara PK di MA yaitu pertama Hakim agung yang ditunjuk untuk memeriksa PK yaitu hakim DEF akan mempelajari putusan terlebih dahulu, dan sebelum menjatuhkan putusan PK ini, mereka harus meminta pendapat (rapat musyawarah / sidang pleno kamar) kamar pidana terlebih dahulu.
- f) Dalam hal meminta pendapat para hakim agung dalam kamar pidana tersebut, pendapat Hakim yang tidak pernah memeriksa perkara (bukan

---

<sup>14</sup> Bahan Hukum Sekunder, Hasil Wawancara dengan Dr. H. Sunarto Tahir, SH., MH., Kepala Badan Pengawasan MA RI, tanggal 29 Juli 2014 di Kantor Badan Pengawasan Jakarta.



- hakim ABC (hakim kasasi) DEF (hakim PK)) akan disebut sebagai *ratio decidendi* yang merupakan pendapat (*legal reasoning*)
- g) Dalam rapat kamar pidana tersebut tidak dikenal dissenting opinion, karena pertimbangan yang disebutkan oleh para hakim kamar tersebut akan berupa legal reasoning yang tidak mengikat hakim majelis PK dalam memutus perkara PK.
  - h) Setelah mendapat pendapat kamar pidana hakim DEF akan bersidang lagi yang nantinya bisa berupa sidang musyawarah internal hakim DEF dan bentuk perbedaan pendapat akan dinamakan *dissenting opinion*.
  - i) Hasil rapat dalam pendapat rapat kamar tidak mengikat dalam menjatuhkan putusan PK akan tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan yang sesuai dengan pendapat dukungan rekan sejawat dapat menjadi acuan dasar pertimbangan hukum.

Dari simulasi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila syarat pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali dihapuskan sama sekali maka akan berakibat terjadinya pengulangan keadaan tersebut berulang kali sampai hakim agung yang berada dalam sistem kamar tersebut habis dan tidak tersisa lagi.

Dalam konteks Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang menjadi hukum adalah bahwa untuk masalah permohonan pengajuan peninjauan kembali yang akan diajukan oleh para pemohon PK dalam hal ini dikhususkan mengenai PK perkara pidana, kini sudah dapat dilakukan lebih dari satu kali dengan syarat pengajuan PK difokuskan pada adanya *novum* yang berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi yang pada saat berpekar belum ada. Norma utama yang diputus dalam perkara ini adalah bahwa hak untuk mengajukan PK lebih dari satu kali oleh pemohon PK sebagai hak konstitusional warga negara berdasarkan pada penegakkan rasa keadilan tidak boleh dilanggar.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka mengenai teori tujuan hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum, cita hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat *regulative* dan konstruktif. Tanpa tujuan hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang :Suryandaru Utama, 2005), hlm. 43

Menurut Hans Kelsen menyebut tujuan hukum sebagai *Grund norm* atau *Basic Norm*.<sup>16</sup> Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di dalam tujuan hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan (*technical policy*). Berkaitan dengan tujuan hukum di Indonesia, maka Pancasila dikatakan sebagai tujuan hukum (*rechtsidee*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan hukum mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.<sup>17</sup>

Untuk mencapai tujuan hukum seperti tujuan hukum menurut Sudikno di atas, maka perlu untuk dihubungkan dengan teori cita hukum oleh Gustav Radbruch, dimana ada 3 (tiga) nilai dasar cita hukum yang seyogyanya menjadi dasar dalam mengoperasikan hukum di Indonesia yaitu:<sup>18</sup>

#### 1) Nilai Kepastian

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Sehingga kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>19</sup> Montesquieu memberikan gagasan yang kemudian dikenal sebagai asas *nullum crimen sine lege*, yang tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara terhadap kesewenangan Negara.<sup>20</sup>

Putusan MK tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum suatu perkara meskipun memberikan keadilan bagi orang yang berperkara, sehingga diperlukan pengaturan baru mengenai PK dalam suatu peraturan

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm.46

<sup>17</sup> Theo Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta :Kanisus, 1995), hlm.129

<sup>18</sup> Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997, hlm. 73-74

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

perundang-undangan. PK pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata.

## 2) Nilai Kemanfaatan

Dalam Pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan manfaatnya. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan atau penegakan hukum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Proses PK yang dapat dilakukan lebih dari satu kali ditujukan untuk penegakkan keadilan, serta untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan Negara dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kepentingan itu sendiri adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Negara harus ditujukan kepada pelayanan umum dengan memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak (kepentingan umum).<sup>22</sup>

Tindakan PK lebih dari satu kali yang berdalih untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia pengaju PK yang merasa tereliminir rasa keadilannya, akan tetapi tidak jelas dalam merumuskan alasan peninjauan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, dikarenakan kepentingan umum memiliki cakupan yang luas,<sup>23</sup> sedangkan di dalam kepentingan umum juga terdapat kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga di dalam penegakan hukum juga perlu diperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan Negara atau kepentingan umum.

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.2

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, **Kapita Selektta Ilmu Hukum**, Jakarta, Liberti, 2011, hlm. 74-75

<sup>23</sup> Ibid.

### 3) Nilai Keadilan

Nilai keadilan dalam peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali yaitu memberikan kebebasan hak dalam mengajukan peninjauan kembali dengan alasan adanya *novum* terkait dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang belum pernah diajukan sebelumnya dalam persidangan maupun PK awal, dan juga benar-benar merupakan bukti yang memuat fakta baru buka merupakan perulangan semata. Sebab PK berulang tersebut dapat juga memperhatikan keadilan korektif, dimana perlu memperbaiki sesuatu yang salah ketika kesalahan dilakukan Negara melalui putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Maka keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak terpidana yang telah dirampas hak-haknya oleh Negara, melalui penangkapan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan. Oleh karena itu peninjauan kembali bertujuan untuk mengembalikan hak-hak terpidana, apabila ditemukan bukti atau keadaan baru dimana dimungkinkan untuk hakim akan memberikan putusan bebas atau lepas kepada terpidana.

Melihat kepastian hukum dan keadilan, seperti melihat dua sisi mata uang. Karena keduanya harus ada untuk menciptakan keadaan damai. Sebuah keadilan tidak dapat dicapai apa bila kepastian tidak dipenuhi. Disini kedua nilai itu mengalami antinomies, karena menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan harus mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil, tetapi juga harus memberikan manfaat darinya.<sup>24</sup>

Namun dengan pemahaman yang ideal, tidak berarti bahwa kesatuan pengertian mengenai apa yang dianggap pasti atau adil menurut hukum. Apa yang adil, atau apa yang pasti, sangat tergantung pada konteksnya. Dan ketika konteksnya menentukan pengertian kepastian dan keadilan, maka masing-masing nilai diharapkan selalu ada berpasangan untuk membentuk suatu ketegangan antara yang baik dan buruk. Dengan

---

<sup>24</sup> Ibid. hlm. 101-102

demikian keduanya harus ada untuk menyempurnakan pengertian antara adil dan pasti secara hukum.<sup>25</sup>

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.<sup>26</sup> Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Perlu diperhatikan lagi bunyi pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, dinyatakan oleh Putusan MK No. 34/PUU-VIII/2013 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi. Dengan dikeluarkannya putusan tersebut membawa implikasi logis dalam praktek sistem peradilan pidana dimana dengan dibatalkannya ketentuan pasal 268 (3) tersebut maka telah menimbulkan suatu ketidak pastian hukum yaitu dengan dapat ditafsirkannya Putusan tersebut dengan beragam pemaknaan bagi masyarakat seperti permintaan PK dapat dilakukan lebih dari satu kali, berkali-kali atau tanpa ada batasan pengajuan.

Dalam pengujian pasal tersebut jelas terlihat bahwa pemohon menginginkan suatu keadilan kepadanya dan bukan kepastian. Karena kepastian hukum sudah ada padanya mulai dari proses hukum di penyidikan, Pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan bahkan di mahkamah agung dan pemohon telah diputus pidana 18 tahun dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terdakwa telah menjalaninya. Akan tetapi yang dimohonkan tersebut adalah supaya pemohon bisa mendapatkan keadilan yang harusnya menjadi haknya.

Sehingga jelas dalam putusan tersebut sesungguhnya sesuai dengan tujuan dalam hukum acara pidana yaitu mencari keadilan materil yaitu kebenaran yang sebenar benarnya atau paling tidak mendekati kebenaran yang hakiki. Dan dalam putusan tersebut juga dapat kita pahami bahwa sesungguhnya kepastian hukum

---

<sup>25</sup> Ibid. hkm. 104

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

harus mengalah jika keadilan ditemukan atau dengan kata lain kebenaran struktural harus mengalah jika kebenaran substantif ditemukan. Selain itu putusan tersebut juga senafas dengan teori hukum progresif yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum sehingga ketika hukum tidak bisa memberikan keadilan kepada manusia maka hukum tersebut bisa dikesampingkan.

Namun disisi lain implikasi putusan tersebut adalah dampak teknis bagi hakim MK dalam memeriksa perkara akan mengalami kekacauan atau kewalahan dalam melayani permintaan peninjauan kembali, mengingat belum adanya aturan lanjutan yang mengatur putusan tersebut.

Memaknai norma dalam suatu peraturan haruslah melihat aturan tersebut secara utuh, sebagai kesatuan yang terdiri dari pasal-pasal, maka dalam membaca atau menafsirkan suatu pasal dalam undang-undang maka pasal tersebut harus diletakkan dalam proporsinya. Pasal yang bersangkutan harus ditempatkan dalam system, jangan dikeluarkan dari system atau undang-undang yang bersangkutan dan diteropong sendiri-sendiri lepas dari pasal-pasal lain dalam undang-undang yang bersangkutan. Sebab suatu pasal dalam satu undang-undang merupakan kesatuan dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut.<sup>27</sup>

Pemaknaan putusan MK tersebut hanya sebagai negative legislator yang banyak memunculkan banyak penafsiran yang berdampak pada penegakkan asas kepastian hukum terkait permohonan pengajuan PK. Peristiwa konkret tersebut tidak ada peraturan yang mengaturnya, maka tidak dengan sendirinya peristiwa itu dapat dilakukan upaya pembatasan terhadap pengajuan PK ataupun tidak. Tetapi haruslah diteliti apakah bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau tidak.

Hal tersebut dapat dilakukan upaya penemuan hukum oleh Mahkamah Agung karena hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap, tetapi penemuan hukum ada metode dan aturannya. Dalam hukum pidana penemuan hukum tidak sebebas hukum perdata. Kepentingan para pihak atau terdakwa haruslah diperhatikan. Sebab hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, baik itu terpidana atau bukan.

---

<sup>27</sup> Ibid. hlm. 118

Hukum memang harus ditegakkan meskipun dunia akan hancur, tetapi hukum juga harus ditegakkan agar dunia tidak hancur (*fiat justitia ne pereat mundus*). Oleh karenanya maka diharapkan dapat dilakukan penyempurnaan pengaturan dalam UU terkait, antara lain RUU KUHAP yang sedang dibahas di DPR RI maupun dengan dapat dikeluarkannya PERMA oleh MA yang mengatur mengenai pembatasan PK tersebut.

### **Simpulan**

Urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali adalah demi tegaknya kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, dengan harapan ketika kepastian hukum sudah tercapai maka dalam kepastian itu akan ada keadilan. Disisi lain ketentuan tersebut juga sesuai dengan asas peradilan pidana cepat, sederhana dan biaya ringan dan secara teknis dapat meningkatkan kualitas putusan, memudahkan MA melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja MA.

Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 mengenai pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah menimbulkan ketidak pastian hukum karena putusan tersebut hanya membatalkan pasal yang diajukan tersebut tanpa adanya pengaturan yang baru sehingga dengan dibatalkannya pengajuan PK hanya satu kali bisa ditafsirkan PK dapat diajukan lebih dari satu kali, berkali kali atau bahkan tanpa ada batasan pengajuan. Putusan ini disatu sisi menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak boleh dihalangi oleh keadilan prosedural. Disisi lain putusan ini akan membawa dampak kekacauan bagi hakim MA untuk melayani permintaan peninjauan kembali

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adami Chazawi, **Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakkan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat)**, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Adami Chazawi, **Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana**, Malang, Bayumedia Publishing, 2008.

Irianto A. Baso Ence, **Negara Hukum dan Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi : Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi**, Bandung, Alumni, 2008.

J.Djohansjah, **Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman**, Bekasi Timur, Kesaint Blanc, 2008.

Jimly Asshidiqie, **Negara Hukum Indonesia**, Makalah yang disampaikan pada Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, Jakarta, Sabtu 23 Januari 2010.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan Ke-6, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2012

Pusat Kajian Konstitusi FH-UB, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 1, Februari 2011, **Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kabupaten Malang dan Kota Pasuruhan)**

Rusli Muhammad, **Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Putusan Kontroversial**, Yogyakarta, UII Press, 2011.

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993

### Internet

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia (LTMARI) 2013, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

### Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013



### **Peraturan Perundang-Undangan**

The Universal Declaration of Human Right, United Nations General Assembly, December, 10<sup>th</sup>, 1948.

Risalah Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1979

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang **Mahkamah Agung**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang **Kekuasaan Kehakiman**

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009 tentang **Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang **perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.**

.